



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSUF MASRUH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 892572

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.016.651.000**

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, Rp. 279.510.000
2. Tanah Seluas 6.405 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, Rp. 385.990.000
3. Tanah Seluas 1.640 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, Rp. 73.205.000
4. Tanah Seluas 2.320 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, Rp. 145.321.000
5. Tanah Seluas 1.040 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.564.000
6. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.564.000
7. Tanah Seluas 5.290 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 292.820.000
8. Tanah Seluas 1.693 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 197.653.500
9. Bangunan Seluas 17 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 223.850.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 738.100.000
11. Tanah Seluas 1.693 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 197.653.500
12. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/416 m2 di KAB / KOTA



JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 365.420.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

859.500.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

364.500.000

2. MOBIL, TOYOTA CROSS HYBRID Tahun 2023, HASIL SENDIRI

Rp. 495.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

297.913.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

2.875.391.560

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

7.049.455.560

III. HUTANG

Rp.

5.227.700

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.044.227.860

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.